

NOTULENSI RAPAT

- Agenda : Pansus Pelabuhan Ambarawang
Hari/Tanggal : Selasa, 16 September 2025
Pukul : 14.00 Wita s/d Selesai
Tempat : Kecamatan Samboja Barat
Pimpinan Rapat : Bapak Ahmad Yani (Ketua DPRD Kab Kukar)
Peserta Rapat :
 - Ketua Pansus Ibu Farida (Anggota DPRD Kukar)
 - Bapak Sa'bir (Anggota DPRD Kukar)
 - Bapak Nasrullah (Anggota DPRD Kukar)
 - Bapak Safruddin (Anggota DPRD Kukar)
 - Ibu Ria Handayani (Anggota DPRD Kukar)
 - Sekwan DPRD Kab Kukar
 - Bapak Toni Bowo Satoto (Bagian Aset)
 - Pak Haryo Martani (Kabag Ekonomi)
 - Direktur PT Tunggang Parangan
 - Perwakilan KUPP Samboja
 - Pak Eka (Konsultan)
 - Perwakilan Kelurahan Ambarawang Laut
 - Perwakilan PT TBS (Pak Taufik & Pak Doni)
 - Staf dan Tenaga Ahli DPRD Kab Kukar

Pembukaan		
Bapak Ahmad Yani (Ketua DPRD Kab Kukar)		- Pansus Pelabuhan Tunggang Parangan bekerja untuk penyusunan Perda peralihan aset ke PT TP. - DPRD & Pemda Kukar menegaskan tidak menyerahkan aset ke IKN karena anggaran daerah sudah banyak dikucurkan. - Perlu klausul dalam dalam Perda apabila PT TP merugi dalam proses mengelola Pelabuhan Ambarawang, tidak akan menjadi permasalahan dikemudian hari dengan catatan sesuai peraturan yang berlaku.
Bapak Awang Lutfi (Direktur PT		- Kami PT TP tadi telah berdiskusi dengan PT TBS (pemenang lelang sisi darat oleh Kemenhub) terkait mekanisme pengelolaan Pelabuhan Ambarawang

Tunggang Parangan)	yang pada intinya PT TBS bersedia bekerjasama dengan Pemda Kukar untuk melakukan pengelolaan Pelabuhan Ambarawang; - Aset yang diserahkan ke PT TP, tidak bisa digadaikan atau dialihkan ke pihak lain sehingga itu menjamin keamanan aset.
Bapak Haryo (Kabag Ekonomi)	- Seperti kita ketahui penguasaan wilayah di Pelabuhan Ambarawang terbagi menjadi 2, sisi laut di kuasai oleh Pemda Kukar dan sisi darat dikuasai oleh Kemenhub, pola yang digunakan Kemenhub untuk pengelolaan asetnya melalui lelang dan pada saat ini dimenangkan PT TBS sebagai pengelola aset Kemenhub pada sisi darat - Ada tawaran dari pihak PT TBS untuk melakukan KSP (Kerja Sama Pemanfaatan) antara Pemda dan PT TBS, bisa langsung antara Pemda dengan PT TBS dengan melibatkan PT TP agar ada atau yang kedua antara PT TBS dengan PT TP karena sudah ada proses pansus penyerahan aset ke PT TP namun keduanya tetap mendapatkan PAD. - Jika antara PT TBS dengan PT TP melalui penyerahan aset dari Pemda ke PT TP maka perlu pertimbangan nilai penyusutan Rp8 Miliar/tahun bagi PT TP.
Bapak Sabir (Anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara)	- Tujuan Pansus Pelabuhan Ambarawang ini dibentuk adalah agar pada akhirnya ada Perda yang terbit - Kemudian tujuan selanjutnya bagaimana caranya Pelabuhan Ambarawang ini dapat meningkatkan PAD & mempertahankan aset daerah, namun kendala utama dalam mengelola Pelabuhan Ambarawang kita tidak punya akses jalan darat

		karena akses jalan sisi darat dimiliki PT TBS (Kemenhub).
Bapak Toni Bowo Satoto (Bagian Aset)		- Pemda Kukar telah mengeluarkan anggaran untuk membangun Pelabuhan Ambarawang dengan nilai sekitar Rp304 Miliar, ini dana yang besar, kita sepakat bagaimana caranya Pelabuhan Ambarawang ini tetap dapat kita kelola dan meningkatkan PAD Pemda Kukar . - Hasil dari diskusi dengan PT TBS ada dua pola pengelolaan yang dapat kita laksanakan dalam mengelola Pelabuhan Ambarawang pertama Penyertaan modal berupa aset Pelabuhan Ambarawang ke Perusda PT TP atau yang kedua kerja sama dalam bentuk KSP dengan PT TBS karena PT TBS pemenang lelang pengelolaan aset Kemenhub pada sisi darat. - Pada Intinya, kedua pola tersebut dapat menguntungkan Pemda Kukar kebetulan PT TBS siap kerja sama dengan Pemda Kukar. - Jika disepakati maka kita siap mengeluarkan BAST untuk PT TP dalam pengelolaan aset Pelabuhan Ambarawang.
Bapak Taufik dan Bapak Doni (PT Tanjung Berlian Samboja)		- Kami PT TBS pemenang lelang untuk mengelola sisi darat pada Pelabuhan Ambarawang dan jangka waktunya selama 50 tahun, dan kami diberikan jangka waktu selama 8 tahun untuk dapat menumbuhkan nilai investasi sebesar 1,3 triliun - Saat ini kami hanya memiliki akses pada sisi darat saja dan kami sangat perlu sisi laut untuk akses kegiatan kami sehingga kami sangat perlu Pelabuhan Ambarawang.

		- Proses pelaksanaan hasil lelang dengan Kemenhub sempat tertunda karena perubahan aturan & munculnya UU IKN, sehingga sekarang ini kami bukan hanya harus memproses ijin ke Kemenhub namun juga kami harus mendapatkan rekomendasi dari Badan OIKN dan saat ini sedang berproses ijin nya di Badan OIKN. - Yang perlu kita perhatikan juga jika terjalin kerjasama antara Pemda Kukar dengan kami PT TBS adalah akses jalan menuju Pelabuhan Ambarawang harapan kami Pemda Kukar dapat melakukan proses pembangunan jalan tersebut. - Pada intinya kami PT TBS siap menjalin kerja sama dengan Pemda Kukar secara langsung atau melalui PT TP namun setelah izin dengan Kemenhub & Badan OIKN selesai.
Bapak Eka Setiawan (Konsultan)		- Jika kita lihat hasil dari diskusi kita pada hari ini ada titik temu mengenai proses pengelolaan Pelabuhan Ambarawang, namun proses ini bukan hal yang sifatnya administratif tentu perlu juga dukungan politik dari DPRD Kab Kukar untuk memperkuat keberlanjutan pengelolaan Pelabuhan Ambarawang.
Ibu Ria Handayani (Anggota DPRD Kukar)		- Menekankan saja, pada saat ini keadaan Pelabuhan Ambarawang belum 100% rampung sehingga perlu ada penambahan biaya untuk penyelesaian Pelabuhan Ambarawang & selain itu terdapat pula kerusakan akibat dari tidak terpakai sehingga perlu perencanaan matang terkait biaya tambahan yang akan dikeluarkan kedepannya.
Ibu Farida (Ketua Pansus)		- Pansus Pelabuhan Ambarawang ini terbentuk atas inisiatif DPRD Kab Kukar sehingga terlihat aktifnya

		DPRD Kab Kukar mendorong agar aset ini dapat dimanfaatkan dan menghasilkan PAD karena anggaran yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan Pelabuhan Ambarawang cukup besar. - Maka dari itu harus ada keseriusan penyelesaian dari kita semua agar Perda penyertaan modal ke PT TP ini segera disahkan agar ada kepastian dan segera terlaksanakan. - Jika kita lihat dari hasil diskusi dengan PT TBS menghasilkan titik terang dalam proses pengelolaan Pelabuhan Ambarawang artinya PT TBS siap bekerjasama dengan Pemda Kukar dalam pengelolaan nya.
Bapak Nasrullah (Anggota DPRD Kukar)		- Tujuan akhir dari pengesahan Perda penyertaan aset ke PT TP adalah mempertahankan dan menetapkan Pelabuhan Ambarawang ditetapkan sebagai aset Pemda & diserahkan ke PT TP untuk dikelola.
KUPP Samboja		- Tahun 2023 sudah menyurati Pemda Kukar terkait status wilayah pelabuhan yang masuk IKN. - PT TBS sudah melakukan proses lelang & mengurus izin di Kemenhub dan Otorita IKN
KESIMPULAN • DPRD & Pemda Kukar sepakat mempertahankan Pelabuhan Ambarawang sebagai aset daerah, tidak diserahkan ke IKN. • Terdapat dua opsi pola pengelolaan: Penyertaan modal ke PT TP atau Skema KSP dengan PT TBS. Kedua pola dianggap tetap menguntungkan daerah dan memberi ruang untuk PAD. • PT TBS siap menjalin kerja sama, tetapi akses jalan darat harus dibenahi dan perubahan regulasi akibat UU IKN masih menjadi tantangan. • Pelabuhan belum sepenuhnya selesai dan ada kerusakan → perlu kejelasan tanggung jawab perbaikan sebelum penyerahan ke PT TP.		

- Pansus menargetkan pengesahan Perda untuk menetapkan pelabuhan sebagai aset Pemda yang dikelola PT TP, dengan klausul perlindungan hukum jika terjadi kerugian.
- Perlu dukungan politik DPRD, sinergi Pemda, PT TP, dan PT TBS untuk memastikan optimalisasi aset serta menambah PAD bagi Kukar.

PENUTUP